

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jika Para dai, mubalig, dan pengkhotbah mengatakan: “Apa artinya hidup di dunia yang Cuma sebentar ini? Kalau toh kita mati, harta, pangkat, dan jabatan tidak akan dibawa mati”. Ungkapan ini. Sepintas nampak benar, tetapi sebenarnya belum tentu benar. Jika kita anggap benar dan kita benar-benar menerapkannya, kita akan memiliki “Pandangan dunia yang pesimis”. Kita akan menyepelekan dan memandang rendah kehidupan dunia. Padahal kehidupan akhirat itu mengandaikan adanya kehidupan dunia. Kesejahteraan dan kebahagiaan yang kita raih di akhirat itu sebenarnya merupakan buah amal perbuatan kita di dunia. (Irawan, 2019)

Pendidikan adalah kebutuhan dasar setiap individu sekaligus menjadi investasi jangka panjang yang memberikan berbagai manfaat dalam kehidupan manusia. Manfaat tersebut bisa berupa keuntungan finansial maupun sosial. Proses pendidikan dapat diperoleh melalui jalur formal, seperti kegiatan belajar mengajar di lembaga pendidikan atau madrasah, serta melalui jalur nonformal, seperti pendidikan yang berlangsung di lingkungan masyarakat atau keluarga.

Bagi seorang muslim sendiri, proses pendidikan ini adalah suatu kewajiban, seperti yang telah di sabdakan oleh Nabi Muhammad SAW :

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

Artinya : “Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim” (HR. Ibnu Majah dari Anas ra)

Dalam konteks kewajiban menuntut ilmu ini, Syaikh Imam Az-Zarnuji menjelaskan bahwa setiap muslim dan muslimah tidak berkewajiban mempelajari semua ilmu, namun berkewajiban mempelajari ilmu yang dibutuhkan saat itu. Dan ditambahkan pula bahwa ilmu yang paling utama adalah ilmu yang dibutuhkan saat itu, dan sebaik-baik amal adalah menjaga (amal) yang dituntut saat itu. (Az-Zarnuji, 2019). Dengan demikian, kita tidak dapat menafikan bahwa belajar dan menuntut ilmu adalah suatu hal yang penting bagi tiap muslim.

Bagi seorang muslim, pendidikan memiliki peran penting sebagai sarana untuk meraih tujuan dan kebahagiaan hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Salah satu tujuan utama dari pendidikan bagi seorang muslim adalah mencapai keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, seorang muslim tidak hanya perlu menguasai pengetahuan umum, tetapi juga perlu memperdalam ilmu agama Islam. Pengetahuan agama yang diperoleh melalui lembaga pendidikan Islam atau madrasah ini menjadi landasan untuk menjadikan kebaikan di dunia sebagai bekal kebaikan di akhirat. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran surah Al-Qashah: 77.

وَاتَّبِعْ فِيمَا أَنْتَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَنْفَعِ الْفَسَادَ

فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya: “Dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu negeri akhirat, dan jangan melupakan bagianmu dari dunia dan berbuat baiklah, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah engkau berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai para pembuat kerusakan”. (Q.S Al- Qashah : 77).

Dalam ayat ini, Allah menyampaikan empat bentuk nasihat dan arahan yang disampaikan kepada karun oleh kaumnya. Barang siapa yang mengamalkan keempat nasihat tersebut, maka ia akan memperoleh kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat.

1. Seseorang yang dikaruniai kekayaan melimpah, harta yang berlimpah, dan berbagai nikmat dari Allah, sepatutnya menggunakan semua itu untuk kepentingan di jalan Allah. Ia dituntut untuk taat pada perintah-Nya dan senantiasa mendekatkan diri kepada-Nya guna meraih pahala di dunia dan akhirat. Rasulullah ﷺ bersabda: *"Manfaatkanlah lima perkara sebelum datang lima perkara: mudamu sebelum tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, waktu luangmu sebelum sibukmu, dan hidupmu sebelum matimu."* (HR. al-Baihaqi dari Ibnu 'Abbas).
2. Islam tidak melarang seseorang menikmati kenikmatan dunia seperti makanan, minuman, pakaian, dan lainnya selama hal tersebut tidak bertentangan dengan aturan yang ditetapkan Allah. Baik Allah, diri sendiri,

maupun keluarga memiliki hak atas seseorang yang wajib dipenuhi. Nabi Muhammad ﷺ bersabda: *"Beramallah seolah-olah engkau akan hidup selamanya, dan berjaga-jagalah seolah-olah engkau akan mati esok hari."* (HR. al-Baihaqi dari Ibnu 'Umar).

3. Setiap orang dianjurkan untuk berbuat kebaikan sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadanya. Contohnya adalah membantu orang yang membutuhkan, menjaga hubungan silaturahmi, dan berbagai bentuk amal baik lainnya.
4. Allah melarang manusia berbuat kerusakan di muka bumi dan melakukan kezaliman terhadap sesama makhluk, sebab Allah tidak menyukai orang-orang yang menyebarkan kerusakan.

Dalam tafsir wajiz menerangkan bahwa nasihat dalam quran surat al-qashah ayat 77 ini tidak berarti seseorang hanya boleh beribadah murni (mahdah) dan melarang memperhatikan dunia. Berusahalah sekuat tenaga dan pikiran untuk memperoleh harta, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu di dunia, berupa kekayaan dan karunia lainnya, dengan menginfakkan dan menggunakannya di jalan Allah. Akan tetapi pada saat yang sama janganlah kamu lupakan bagianmu dari kenikmatan di dunia dengan tanpa berlebihan. Dan berbuat baiklah kepada semua orang dengan bersedekah sebagaimana atau disebabkan karena Allah telah berbuat baik kepadamu dengan mengaruniakan nikmat-Nya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan dalam bentuk apa pun di bagian mana pun di bumi ini, dengan melampaui batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan dan akan memberikan balasan atas kejahatan tersebut.

Adapun dalam tafsir ibnu katsir, menjelaskan bahwa ayat ini bermaksud agar kita dapat menggunakan harta yang berlimpah dan nikmat yang bergelimang sebagai karunia Allah kepada kita sebagai bekal ketaatan kepada Allah SWT dan mendekatkan diri kepada-Nya dengan mengerjakan berbagai amal pendekatan diri kepada-Nya, yang dengannya kita akan memperoleh pahala di dunia dan akhirat.

Madrasah menjadi salah satu alternatif yang tepat dalam menyediakan pendidikan yang seimbang, yaitu antara ilmu pengetahuan umum dan pendidikan

Agama Islam sebagai bekal menuju kebahagiaan akhirat. Keberadaan lembaga pendidikan Islam ini tidak dapat dipisahkan dari sejarah masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia, di mana salah satu cara penyebaran agama Islam adalah melalui pendidikan. Seiring dengan meningkatnya jumlah pemeluk Islam di Indonesia, kebutuhan akan lembaga pendidikan yang memadai untuk mempelajari agama pun semakin besar. Oleh karena itu, didirikan berbagai institusi pendidikan Islam seperti pesantren, madrasah negeri dan swasta, serta sekolah Islam terpadu, agar umat Islam di Indonesia memiliki akses yang luas untuk menempuh pendidikan agama, baik di lembaga formal negeri maupun swasta.

Banyaknya jumlah madrasah swasta, menumbuhkan kompetisi antar lembaga pendidikan, baik dalam bentuk keunggulan fasilitas, bangunan sekolah, ataupun kebanggaan terhadap mutu pendidikan. Beberapa lembaga pendidikan Islam swasta/ Madrasah saat ini ada yang sudah mampu dan berhasil membangun sarana prasarana yang unggul dibawah manajemen yayasan yang memiliki cukup biaya, Akan tetapi disamping itu semua, Masih banyak pula lembaga pendidikan Islam swasta yang dibangun di bawah yayasan dengan keterbatasan biaya, sehingga lembaga pendidikan/ madrasah tersebut belum mapu bersaing dalam keunggulan sarana prasarana.

Pada dasarnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, Bab XII pasal 45 dijelaskan bahwa sarana dan prasarana yang disiapkan setiap satuan pendidikan tidak berdasarkan keunggulan fisiknya saja, selama masih memenuhi dasar keperluan pendidikan yang sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. Namun pada kenyataannya selain keunggulan secara mutu, banyak sekolah Islam swasta tersebut yang mengedepankan sarana prasarana dan memberlakukan biaya pendidikan yang mahal sebagai kompensasi.

Penetapan biaya pendidikan yang relatif tinggi di sejumlah madrasah atau sekolah Islam swasta didasarkan pada konsep pembiayaan pendidikan yang terdiri dari beberapa komponen. Pertama, **biaya pembangunan (*capital cost*)**, yakni dana yang dialokasikan untuk pengadaan lahan, pembangunan ruang kelas, fasilitas

olahraga, perpustakaan, perlengkapan belajar, serta biaya perbaikan dan konstruksi bangunan. Biaya ini biasanya dibebankan di awal saat proses pendaftaran siswa dalam bentuk *enrollment fee*.

Kedua, **biaya operasional rutin (*recurrent cost*)**, yaitu dana yang digunakan untuk menjalankan kegiatan operasional sekolah selama satu tahun anggaran. Termasuk dalam komponen ini adalah pembayaran gaji tenaga pendidik dan kependidikan, biaya listrik, administrasi, serta pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah.

Ketiga, biaya rutin ini juga menjadi dasar dalam menetapkan **biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)** atau *tuition fee* yang dibayarkan setiap bulan. Semakin besar nilai capital cost dan recurrent cost di suatu sekolah, maka akan semakin tinggi pula biaya pendaftaran awal dan SPP bulanannya.

Kebijakan biaya tinggi di sekolah Islam swasta umumnya dilatarbelakangi oleh tuntutan peningkatan kualitas layanan dan fasilitas pendidikan. Selama biaya tersebut diimbangi dengan pelayanan dan kualitas yang memuaskan, serta tidak memberatkan wali murid, hal ini dipandang sebagai hal yang wajar dan dapat diterima oleh masyarakat.

Meskipun terdapat fenomena lembaga pendidikan Islam swasta yang mematok biaya tinggi, kenyataannya masih banyak madrasah atau sekolah Islam swasta dengan biaya terjangkau yang menjadi pilihan utama bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk menyekolahkan anak-anak mereka. Hal ini didukung oleh temuan dari penelitian yang dilakukan oleh *Center for Indonesian Policy Studies (CIPS)*, yang mengkaji keberadaan sekolah-sekolah swasta berbiaya rendah. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa jenis sekolah ini menjadi jalur pendidikan formal bagi keluarga dengan pendapatan terbatas, khususnya mereka yang kesulitan memenuhi persyaratan administratif sekolah swasta yang lebih mahal. Biaya pendidikan yang rendah menjadikan sekolah-sekolah ini lebih mudah diakses oleh masyarakat kurang mampu. Menariknya, meskipun fasilitas fisik mereka terbatas, mutu pendidikan di sekolah-sekolah ini cukup kompetitif, bahkan dalam beberapa kasus mencatatkan hasil ujian akhir yang 23,8% lebih tinggi dibandingkan sekolah negeri, serta mampu bersaing secara kualitas dengan sekolah swasta berbiaya tinggi.

Pada hasil penelitian yang dilakukan *Center for Indonesian Policy Studies (CIPS)* di atas dijelaskan pula bahwa eksistensi dari sekolah-sekolah berbiaya murah ini ternyata berperan penting dalam sistem pendidikan di Indonesia, khususnya di wilayah dengan mayoritas penduduk berpenghasilan kurang dari Rp.800.000,- perbulan seperti petani, pedagang pasar, asisten rumah tangga, dan lain sebagainya. Dan pada kenyataannya perlu kita ketahui, bahwa terdapat beberapa kendala pada lembaga pendidikan swasta tersebut, ketika memberlakukan biaya pendidikan yang dinilai cukup murah, diantaranya kendala pembiayaan. Pemasukan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dari masyarakat yang murah tidak cukup mengatasi pembiayaan operasional rutin (*recurrent cost*), sehingga keberlangsungan sekolah-sekolah tersebut sangat bergantung pada subsidi pemerintah yang kadang terkendala dan terhambat oleh persoalan birokrasi.

Berdasarkan uraian-uraian persoalan masalah di atas, menjadi motivasi bagi penulis untuk meneliti sebuah lembaga pendidikan islam swasta/ madrasah yang sedang mengupayakan pengelolaan manajemen pembiayaan ini sebagai suatu startegi dalam menghadapi kemungkinan-kemungkinan di luar prediksi berkaitan dengan keberlangsungan pembiayaan lembaga pendidikan tersebut, yang bertujuan untuk memberikan fasilitas pendidikan berbiaya terjangkau pada masyarakat, dalam hal ini penulis memilih Mts dan MA Amal Islami Kota Sukabumi sebagai lokus penelitian.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Setelah masalah di identifikasi dan dilakukan pembatasan agar lebih fokus dalam penelitian untuk mendapatkan output yang bermanfaat, maka penulis akan merumuskan masalah penelitian ini dalam beberapa ungkapan:

1. Bagaimanakah Realitas Manajemen Pembiayaan di Mts dan MA Amal Islami Kota Sukabumi ?
2. Bagaimanakah Realitas Kemandirian Finansial di MTs dan MA Amal Islami Kota Sukabumi ?
3. Apakah Terdapat Analisis Pengaruh Manajemen Pembiayaan Terhadap Kemandirian Finansial di MTs dan MA Amal Islami Kota Sukabumi ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari hasil penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan banyak manfaat untuk berbagai pihak, baik itu kebermanfaatan secara teoritis maupun praktis, terutama dalam melakukan inovasi pengelolaan pembiayaan pada lembaga pendidikan Islam swasta/ Madrasah swasta di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan yang diharapkan melalui penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui realitas manajemen pembiayaan di MTs dan MA Amal Islami Kota Sukabumi
2. Untuk mengetahui realitas kemandirian finansial di MTs dan MA Amal Islami Kota Sukabumi
3. Untuk mengetahui analisis pengaruh manajemen pembiayaan terhadap kemandirian finansial madrasah swasta di MTs dan MA Amal Islami Kota Sukabumi

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. **Manfaat Teoritis**, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk penelitian berikutnya ataupun dapat dijadikan bahan perbandingan dalam penelitian serupa, serta dapat mengembangkan konsep-konsep juga teori-teori yang sudah ada yang akan melahirkan konsep-konsep dan teori-teori baru dalam manajemen mengelola pembiayaan mandiri pada madrasah swasta agar menjadi lebih baik.

2. **Manfaat Praktis**

- a. **Bagi Peneliti**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran serta menambah wawasan pengetahuan penulis terkait tentang pelaksanaan manajemen pembiayaan terhadap kemandirian finansial madrasah swasta.

b. Bagi Lembaga Pendidikan

Diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas manajemen pembiayaan yang nantinya akan digunakan sebagai landasan untuk meningkatkan kemandirian finansial lembaga madrasah swasta.

c. Bagi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan referensi atau acuan bagi peneliti lainnya yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut pada bidang yang sama.

E. Kerangka Berfikir

Manajemen pembiayaan merupakan suatu proses dalam mengoptimalkan sumber dana yang sudah ada, mengalokasikan dana yang tersedia serta mendistribusikannya sebagai fasilitas atau sarana dalam mendukung proses belajar mengajar sehingga terciptalah proses belajar mengajar yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, fokus manajemen pembiayaan pendidikan terletak pada bagaimana sumber dana yang ada mampu dikelola dengan cara yang profesional sehingga dapat memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan (Jaja Jahari, 2013) Manajemen menginginkan tujuan tercapai secara efektif dan efisien. Dengan kata lain keberhasilan manajer diukur dari tingkat efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi. (Badrudin, 2015)

Dalam penyelenggaraan kualitas pendidikan dibutuhkan pembiayaan dengan perhitungan yang akurat sehingga berkesesuaian dengan kualitas yang disyaratkan. Pembiayaan pendidikan merupakan cost yang harus dikeluarkan yaitu perhitungan atau biaya yang dikeluarkan untuk membiayai seluruh kegiatan sekolah yang ada relevansinya dengan pendidikan. Permasalahan ini membutuhkan suatu manajemen yang baik dan transparan (Abidin, Manajemen Pembiayaan Pendidikan Tinggi Dalam Upaya Peningkatan Mutu (Studi Kasus Pada Perguruan Tinggi Swasta Menengah di Surabaya, 2017).

Pembiayaan pendidikan merupakan salah satu komponen yang menunjang keberhasilan suatu pendidikan, dalam proses pembiayaan pendidikan Perlu adanya

manajemen pembiayaan yang baik untuk menunjang keberhasilan suatu pembiayaan. (Badrudin, 2002)

Fokus manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan bersifat publik, menurut (Abdullah, 2011) merupakan upaya pengelolaan sumber dana yang tersedia di lembaga pendidikan untuk dapat dipergunakan seefektif mungkin, dalam pengertian bahwa dana (uang) yang tersedia itu bisa dipergunakan untuk memberikan layanan pendidikan sesuai dengan perencanaan (budgeting) yang sudah ditetapkan.

Untuk memahami berbagai prinsip manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan di atas, dijelaskan beberapa prinsip penting saja, diantaranya 1) transparansi, 2) akuntabilitas, 3) efektivitas, 4) efisiensi sesuai dengan kebutuhan yang diisyaratkan, 5) peningkatan partisipasi stakeholder pendidikan, 6) hemat, tidak mewah, 7) terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan, 8) keharusan penggunaan produksi dalam negeri (Tangkudung, 2014).

Menurut Jhons dan Morphet bahwa hal yang perlu diperhatikan adalah tujuan pendidikan yang akan dicapai, prioritas program pembangunan pendidikan yang menekankan pada aspek kualitas dan kuantitas, upaya meningkatkan pemerataan kesempatan pendidikan, biaya yang dibutuhkan dan alokasi sumber daya dan dana yang akan digunakan untuk penyelenggaraan pendidikan.

Agar tujuan lembaga pendidikan yang telah ditetapkan dapat terlaksana dengan baik dan tercapai dengan efektif dan efisien maka perlu memfungsikan manajemen itu sendiri dengan baik. Dalam Manajemen Berbasis Sekolah dan Manajemen Pendidikan, (Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah dan Manajemen Pendidikan, 2011) menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan pendidikan mencakup:

1. Perencanaan anggaran (*budgeting*),
2. Pelaksanaan dan pencatatan (*accounting*),
3. Pengawasan/evaluasi (*auditing*).

Melalui kegiatan manajemen keuangan dan pembiayaan, kebutuhan pendanaan, pembiayaan kegiatan dan anggaran lembaga pendidikan dapat direncanakan, diupayakan pengadaannya, dibukukan secara transparan, digunakan untuk

membiayai pelaksanaan program lembaga pendidikan secara efektif dan efisien, sekaligus dipertanggungjawabkan untuk memberikan rasa puas pada pihak-pihak yang mendonasikan uang untuk kegiatan lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan madrasah yang bermutu dalam mengelola keuangan sesuai siklus perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan dan pengawasan (PPEPP) menganut pada standar pembiayaan pendidikan, dengan menganalisis sumber-sumber pendapatan dan penggunaan biaya yang diperuntukan dalam pengelolaan pendidikan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pendidikan. (Sarah McVay, 2021)

Uraian ini sekaligus memperkuat Untuk itu tujuan manajemen keuangan dan pembiayaan bagi lembaga pendidikan adalah:

1. Meningkatkan penggalan sumber biaya lembaga pendidikan
2. Menciptakan pengendalian yang tepat sumber keuangan organisasi pendidikan
3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan lembaga pendidikan
4. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan lembaga pendidikan
5. Meminimalkan penyalahgunaan anggaran lembaga pendidikan
6. Mengatur dana-dana yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang tercapainya tujuan lembaga pendidikan dan tujuan pembelajaran.
7. Membangun sistem pengelolaan keuangan yang sehat, mudah diakses dan memiliki sistem pengamanan yang terjamin dari tindakan-tindakan yang tidak terpuji.
8. Meningkatkan partisipasi stakeholders pendidikan dalam pembiayaan pendidikan

Kemandirian finansial merupakan keadaan dimana individu mampu membiayai kebutuhan pribadi dengan hasil usahanya sendiri. Hal ini sejalan dengan (perrone,

2015) yang mengungkapkan bahwa kemandirian finansial adalah suatu kondisi dimana individu menerima sumber penghasilan berkelanjutan sehingga tidak perlu lagi bergantung pada orang lain karena penghasilannya telah cukup untuk mendanai pilihan hidup yang diinginkan. Berdasarkan definisi tersebut, kemandirian finansial menjadi vital untuk dapat dicapai oleh setiap individu.

Arnett mengungkapkan bahwa kemandirian finansial sangat penting bagi kehidupan seseorang, baik secara individual maupun sosial. Secara individual artinya dengan kemandirian finansial seseorang dapat memenuhi kebutuhan pribadinya, seperti makanan, transportasi, dan kesehatan. Kebutuhan tersebut menjadi kebutuhan primer yang perlu dipenuhi. Jika tidak, seseorang tidak dapat hidup dengan layak. Sebagai contoh, saat seseorang tidak memiliki penghasilan untuk membeli makanan sebagaimana mestinya, maka orang tersebut akan sangat rentan untuk terserang penyakit atau mengalami gizi buruk. Hal ini mengindikasikan betapa pentingnya kemandirian finansial secara individual.

Dari sudut pandang sosial, individu dewasa yang mampu memenuhi kebutuhan finansialnya secara mandiri turut berperan dalam membentuk masyarakat yang sejahtera. Masyarakat yang sejahtera di sini merujuk pada kelompok masyarakat yang tidak lagi bergantung pada bantuan sosial dari pemerintah, seperti bantuan langsung tunai (BLT), program subsidi beras untuk masyarakat miskin (Raskin), Program Keluarga Harapan (PKH), atau tunjangan rutin bagi penyandang disabilitas. Semakin banyak individu yang mandiri secara ekonomi, maka beban pemberian bantuan oleh pemerintah pun akan berkurang, karena mereka telah sanggup membiayai kebutuhan hidupnya sendiri.

Dalam konteks pendidikan, penganggaran merupakan bagian penting dari proses perencanaan dalam manajemen keuangan. Dalam teori manajemen, fungsi perencanaan memiliki kedudukan yang setara dengan fungsi-fungsi lainnya, seperti pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Perencanaan yang disusun secara terstruktur dan rasional akan menjadi landasan awal yang kuat untuk mengoptimalkan proses pelaksanaan dan pengawasan, hingga akhirnya tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Penyusunan anggaran di lingkungan satuan pendidikan juga merupakan hal yang wajib dilakukan. Meskipun prosesnya tidak sekompleks penyusunan anggaran di perusahaan besar atau instansi pemerintahan, tetap harus mengacu pada prinsip-prinsip dan ketentuan umum yang berlaku. Dokumen anggaran ini dikenal dengan istilah Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS).

Terkait pengalokasian dana atau biaya yang akan dikeluarkan, umumnya tercantum secara rinci dalam RAPBS, yang biasanya dipresentasikan oleh pihak sekolah dalam forum rapat BP3 (Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan) atau Komite Sekolah bersama orang tua siswa. Dalam forum tersebut, pihak sekolah menyampaikan hasil penyusunan RAPBS sekaligus menjelaskan program-program yang direncanakan untuk dilaksanakan.

Apabila anggaran menghendaki fungsi sebagai alat perencanaan maupun pengendalian, maka anggaran harus disusun berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut: (a) Adanya pembagian wewenang dan tanggungjawab yang jelas dalam sistem manajemen dan organisasi; (b) Adanya sistem akuntansi yang memadai dalam melaksanakan anggaran; (c) Adanya penelitian dan analisis untuk menilai kinerja organisasi; (d) Adanya dukungan (Fatah M. , 2012)

Adapun ciri-ciri sekolah mandiri menurut (Susilo, 2017), yakni unggul dalam manajemen sekolah, pengembangan kurikulum, metode pembelajaran, perbaikan evaluasi, pengadaan tenaga pendidik dan non kependidikan, penggalian dana, peningkatan sarana dan prasarana, peningkatan mutu akademis, kedisiplinan civitas akademik, peningkatan SDM maupun hal-hal lain.

Kemandirian finansial dalam dunia pendidikan pun menjadi suatu yang sangat penting untuk dibahas, bagaimana pada akhirnya lembaga pendidikan tersebut dapat berdiri secara mandiri, tanpa harus selalu menunggu bantuan keuangan pendidikan dari pemerintah, yang terkadang tidak pasti, ataupun tidak dapat diperkirakan kapan datangnya. terlebih untuk lembaga pendidikan islam swasta/ madrasah. Sehingga kekhawatiran akan ketidakberjalanan proses pendidikan karena terhambat oleh faktor keuangan di sebuah lembaga dapat diatasi secara mandiri oleh lembaga tersebut.

Tabel 1. 1 Kerangka Berpikir



Kerangka berpikir pada gambar tersebut menunjukkan adanya keterkaitan antara manajemen pembiayaan (X) yang meliputi perencanaan keuangan (budgeting), pelaksanaan (accounting), serta penilaian/ evaluasi (auditing) dengan kemandirian finansial madrasah (Y). Manajemen pembiayaan yang baik akan mendukung adanya

sistem akuntansi yang memadai, pembagian wewenang yang jelas, penelitian untuk menilai kinerja organisasi, serta dukungan dari seluruh pelaksana dalam melaksanakan program kerja.

Dengan demikian, semakin efektif manajemen pembiayaan yang diterapkan oleh madrasah, maka semakin tinggi pula tingkat kemandirian finansial yang dapat dicapai. Hal ini karena pengelolaan pembiayaan yang terencana, transparan, dan akuntabel akan memperkuat kemampuan madrasah dalam mengatur sumber daya keuangan secara mandiri, mengurangi ketergantungan, serta meningkatkan keberlanjutan program pendidikan.

F. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang perlu diuji kebenarannya dengan data yang lengkap dan menunjang (Sugiono, 2017) Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan Manajemen Pembiayaan Terhadap Kemandirian Finansial Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah Amal Islami Kota Sukabumi.

Berikut ini perumusan hipotesis dari penelitian ini:

Ha: > (Hipotesis Alternatif)

Terdapat hubungan positif antara Manajemen Pembiayaan Terhadap Kemandirian Finansial Madrasah Swasta.

Ho: = (Hipotesis Nol)

Tidak terdapat hubungan antara Manajemen Pembiayaan Terhadap Kemandirian Finansial Madrasah Swasta.

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Pada sebuah upaya untuk melakukan penelitian, maka dibutuhkan sebuah panduan serta dukungan untuk setiap hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya yang berkaitan dengan sebuah penelitian yang sedang/ akan dilakukan. Untuk memperdalam kajian mengenai Analisis Pengaruh Manajemen Pembiayaan

Terhadap Kemandirian Finansial Madrasah Swasta ini telah dikaji beberapa pustaka yang relevan dengan penelitian ini, Yaitu sebagai berikut :



No	Penulis, Tahun	Judul	Hasil	Persamaan dan Perbedaan
1	Laty Saniah, 2020	Strategi pembiayaan mandiri di lembaga pendidikan islam swasta dalam bentuk badan usaha milik lembaga pendidikan (BUMLP) (Studi Kasus di SMA Muhammadiyah 8 Ciputat)	Secara teori, SMA Muhammadiyah 8 Ciputat merespon krisis pembiayaan dengan melakukan strategi fase demi fase, diawali dengan fokus pada pelayanan dan melakukan kegiatan investasi. Dilanjutkan dengan pengembangan paradigm dalam pengelolaan keuangan, melakukan kegiatan yang menghasilkan uang dan meningkatkan profesionalisme organisasi sebagai respon pada fase bertahan (Survive). Kini, SMA Muhammadiyah 8 Ciputat tengah berada pada fase kemajuan (Progress) ditandai dengan majunya aplikasi program, mulai memiliki kekuatan finansial, mengelola kekuatan finansial, mengelola keuangan dengan baik dan mulai memiliki cadangan dana.	Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas cara dalam mencapai kemandirian finansial lembaga pendidikan/ madrasah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah pada penelitian ini memfokuskan bahasan dalam mencapai kemandirian finansial lembaga pendidikan dengan peneglolaan BUMLP (Badan usaha milik lembaga pendidikan), sedangkan penulis memfokuskan bahasan dalam mencapai kemandirian finansila madrasah dengan

			Sebuah lembaga pendidikan Islam swasta dapat melalui krisis pembiayaan dan dapat melakukan pengembangan lembaga baik kualitas pendidikan maupun sarana prasarana, tanpa harus memberlakukan biaya mahal terhadap siswa, melainkan dengan membangun Badan Usaha Milik Lembaga Pendidikan (BUMLP) sebagai strategi pembiayaan mandiri. Sebagai contoh kasus di SMA Muhammadiyah Ciputat; 80% masyarakat umum diberlakukan nilai SPP Rp.200.000,-/bulan, RP.100.000,-/bulan (diskon 50%) khusus untuk siswa dari masyarakat sekitar sekolah dan 20% bebas biaya untuk kalangan masyarakat dhuafa dan yatim piatu. Jumlah nilai SPP tersebut cukup murah dengan kompensasi pelayanan dan sarana prasarana yang memadai.	pengelolaan manajemen pembiayaan.
--	--	--	--	--

2	Resti Andini, 2023	Implementasi manajemen pembiayaan dalam kemandirian Lembaga pendidikan di Yayasan Pondok Pesantren Al-Hidayat Gerning Pesawaran	Pada tingkat sekolah (satuan pendidikan), biaya pendidikan diperoleh dari subsidi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, iuran siswa dan sumbangan masyarakat. Sejauh ini tercatat dalam rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS), sebagian besar biaya pendidikan di tingkat sekolah berasal dari pemerintah pusat, sedangkan sekolah swasta berasal dari para siswa dan yayasan Sekolah sebagai lembaga pendidikan harus mampu membuat pintu-pintu sumber dana untuk membiayai keperluan sekolah. Di Indonesia sumber-sumber dana sekolah berbeda-beda sesuai dengan jenis sekolah dan cara sekolah mendapatkan tambahan biaya untuk sekolah yang dikelola. "Sumber-sumber keuangan sekolah dapat bersumber dari orang tua,	Persamaan pada penelitian ini terhadap penelitian yang akan di kaji oleh penulis pada skripsi kali ini adalah kesamaan dalam bahasan variable x, yang memfokuskan pembahasannya pada bahasan manajemen pembiayaan di lembaga swasta. Perbedaan pada penelitian ini, peneliti memfokuskan variable y nya pada lembaga non formal (Yayasan), yang secara tidak langsung pula menjadi bagian dari lembaga swasta, yang dalam pengelolaan keuangannya lebih didasarkan pada pengelolaan secara mandiri.
---	--------------------	---	--	---

			pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, dunia usaha dan alumni.	
3	Aisyatur Rayidah, Rina Sarifah Lustia, Bekti Djamaludin Perawironegoro, 2022	Pembiayaan pendidikan dalam meningkatkan mutu PAI di SD Muhammadiyah, Ngestiharjo	Penelitian ini berfokus pada pengelolaan pembiayaan sekolah, dan cara sekolah meningkatkan mutu pendidikan, tekhusus bai mutu pendidikan agama islam melalui pembiayaan, sehingga penelitian ini bertujuan sebagai salah satu strategi yang bisa diterapkan oleh lembaga pendidikan swasta di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan studi kasus pembiayaan pendidikan sekolah swasta, yaitu SD Muhammadiyah Ngestiharjo yang dinilai mampu mengatasi problema pembiayaan pendidikan swasta. SD Muhammadiyah Ngestiharjo merealisasikan program pendidikan gratis oleh pemeritah. Melalui program tersebut,	Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama Kajian ini berfokus pada pengelolaan pembiayaan sekolah. Perbedaan dari penelitian ini adalah Penelitian ini Lebih difokuskan kepada mutu Pendidikan Agama Islam, Sedangkan penulis lebih fokus pada kemandirian Madrasah Tsanawiyah.

			maka pengelolaan pembiayaan pendidikan yang dilakukan oleh SD Muhammadiyah Ngestiharjo menjadi disiplin melalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban. Pengelolaan ini sesuai dengan teori manajemen keuangan yaitu melalui input-proses-output, Kegiatan tersebut dilakukan agar pembiayaan dalam sekolah terealisasi dan terjaga sehingga visi-misi sekolah dapat tercapai.	
4	M. Ridho Arifin, 2021	Manajemen pembiayaan dalam membangun kemandirian pesantren di Pesantren Pelajar Islam Nurul Burhan Badean Bondowoso	Upaya membangun kemandirian pesantren yang dilakukan oleh Pesantren Pelajar Islam Nurul Burhan Badean Bondowoso diantaranya adalah menerapkan prinsip tidak meminta kepada mahluk baik perorangan atau kelompok, dengan diterapkannya prinsip ini mampu menjadikan pesantren yang mandiri. Manajemen Pembiayaan di Pesantren Pelajar Islam	Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas cara/ upaya yang dapat dilakukan oleh lembaga pendidikan swasta dalam mencapai kemandirian finansial lembaga/ madrasah. Adapun Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah pada

		Nurul Burhan Badean Bondowos meliputi proses penganggaran (budgeting), pelaksanaan (accounting), evaluasi (monitoring- evaluating- reporting). a). Proses penganggaran yaitu pembentukan tim penyusun draf anggaran, pengadaan rapat dengan pengurus pesantren, persetujuan usulan anggaran, dan pengesahan anggaran. b). Proses pelaksanaan pembiayaan terdiri dari proses penerimaan dan pengeluaran yang mana setiap transaksi keduanya dicatat dan dibukukan menggunakan pembukuan kas harian dan neraca akhir bulan. c). Proses evaluasi terdiri dari tiga tahapan proses yaitu: 1) Pengawasan dengan sistem pengawasan melekat, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Bendahara Yayasan dan bendahara pesantren kepada pihak dibawahnya. 2) Evaluasi dengan mengadakan rapat	penelitian ini memfokuskan penelitiannya pada kemandirian finansial pondok pesantren, sedangkan penulis memfokuskan penelitian ini pada kemandirian finansial madrasah tsanawiyah.
--	--	---	---

			koordinasi setiap akhir bulan yang melibatkan seluruh pengurus pesantren dan musyrif pesantren. 3) Pelaporan dengan sistem pelaporan berjenjang, yaitu pengurus pesantren kepada bendahara pesantren, bendahara pesantren kepada bendahara yayasan. Manajemen pembiayaan memiliki implikasi dalam upaya membangun kemandirian pesantren di Pesantren Pelajar Islam Nurul Burhan Baean Bondowoso.	
5	Mesiono, Suswanto, Rahmat Rifai Lubis, Haidir, 2021	Manajemen pembiayaan pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan di Madrasah Aliyah Imam Muslim Serdang Bedagai	Dalam merencanakan pembiayaan pendidikan Kepala Madrasah Aliyah Imam Muslim Kabupaten Serdang Bedagai melaksanakan beberapa dimensi sebagai berikut : (1) perencanaan yang berisikan pengumpulan data, pengolahan data, diagnosa, perumusan kebijakan, estimasi	Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah pada variable x yaitu membahas tentang manajemen pembiayaan. Perbedaan dari penelitian ini adalah fokus variable y yang

			kebutuhan, melakukan penganggaran kebutuhan dana dan memilih sasaran, (2) merumuskan rencana, (3) perincian rencana, (4) implementasi rencana, dan (5) revisi dan melakukan perencanaan setelahnya. Kemudian Pelaksanaan manajemen pembiayaan pendidikan terpenuhi dan mampu direalisasikan di Madrasah Aliyah Imam Muslim Kabupaten Serdang Bedagai. Pada pengawasan penggunaan biaya pendidikan di Madrasah Aliyah Imam Muslim Kabupaten Serdang Bedagai senantiasa dilaksanakan dengan RAPB. Kepala Madrasah Aliyah Imam Muslim Kabupaten Serdang Bedagai telah mampu melakukan manajemen pembiayaan pendidikan secara efektif dan efisien. Upaya yang dilakukan Kepala Madrasah Aliyah Imam Muslim Kabupaten Serdang Bedagai	membahas pada mutu pendidikan, sedangkan penulis memfokuskan bahasan pada variable y untuk kemandirian finansial madrasah.
--	--	--	---	---

			dalam meningkatkan mutu pendidikan adalah dengan memberikan kesempatan kepada seluruh staf pendidik untuk melanjutkan perkuliahan ketingkat yang lebih tinggi, seperti ada pendidik yang kuliah S1 (karena memang belum sarjana), ada pendidik yang kuliah S2 dan bahkan S3.	
--	--	--	---	--

Tabel 1. 2 Penelitian Terdahulu

